

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Kondisi Penyandang disabilitas di Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau. Pekanbaru dikenal dengan julukan kota bertuah yang merupakan singkatan dari bersih, tertib, usaha bersama, aman dan harmonis. Pekanbaru yang dikenal sebagai kota melayu, karena Pekanbaru merupakan garda utama di provinsi Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam hal menjaga dan melestarikan kebudayaan melayu yang menjadi visinya di tahun 2021. Kota Pekanbaru memiliki penduduk yang cukup banyak, oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah Pekanbaru memperhatikan masyarakatnya. Bukan hanya masyarakat yang normal saja, tetapi masyarakat yang mengalami disabilitas juga tak boleh luput dari perhatian.

Disabilitas seringkali dipahami berbeda kemampuan, memiliki kebutuhan khusus, atau mempunyai cara berbeda dalam melakukan sesuatu. Seringkali penyandang disabilitas luput dari perhatian karena jumlah nya yang relatif kecil. Difabel memaknai bahwa setiap orang yang disebut difabel hanya memiliki cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Penyebutan penyandang disabilitas mempengaruhi juga bagaimana perlakuan terhadap penyandang disabilitas dan mempengaruhi juga gerakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dimulai dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebutan ‘penyandang cacat’ yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek yang tidak normal dan sering kali diperlakukan berdasarkan belas kasihan. Kemudian berkembang menjadi ‘penyandang disabilitas’ yang menempatkan penyandang disabilitas lebih maju. Kemudian menjadi ‘difabel’ yang dianggap lebih maju lagi karena berpandangan bahwa difabel adalah orang yang sama dengan non difabel, dimana perbedaan hanyalah masalah cara dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, mereka harus didukung dengan pemberian fasilitas yang sama bagi disabilitas.

Pekanbaru memiliki jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa dengan penyandang disabilitas berjumlah 860 jiwa. Walaupun demikian pemerintah Pekanbaru seharusnya memberikan fasilitas yang layak bagi disabilitas. Sejahtera ini, pemerintah Pekanbaru belum pro dengan disabilitas walaupun sudah mulai memenuhi fasilitas bagi disabilitas.

4.2 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Sejarah

Dinas perhubungan kota Pekanbaru adalah perangkat daerah yang diberi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang perhubungan daerah. Sejarah DisHubKomInfo kota Pekanbaru dimulai sejak awal tahun 1970-an, dimana masalah lalu lintas masih ditangani oleh Departemen PU. Dengan adanya undang-undang dan perluasan wewenang dibentuklah sebuah badan yang menangani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah pengawasan lalu lintas dan angkutan, dimana sebagian wewenang Departemen PU mengenai lalu lintas dilepas kepada sebuah badan yang bernama Inspektorat lalu lintas pada tahun 1976.

Inspektorat yang merupakan cikal bakal Dishubkominfo diperluas lagi oleh departemen perhubungan pada tahun 1985, dimana lalu lintas dan angkutan jalan raya merupakan unit pelaksana teknis Dirjen Perhubungan Darat, yang berada dibawah naungan pusat yang dikoordinasi dan dibina oleh inspeksi lalu lintas angkutan jalan raya provinsi Riau. Lalu lintas angkutan jalan raya berfungsi menangani lalu lintas dan angkutan jalan raya, hingga akhirnya keluar uu no.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kemudian kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) diubah menjadi LLAJ kota Madya Pekanbaru berdasarkan PP 22 Tahun 1992 tentang penyerahan sebagian urusan dibidang lalu lintas dan daya angkutan raya kepada pemerintah tingkat I dan pemerintah tingkat II maka dibentuk dinas LLAJ kota Pekanbaru. Kantor dinas perhubungan berdiri pada tanggal 28 oktober 1988 sesuai dengan keputusan menteri perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat disektor perhubungan baik darat, laut maupun udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia sebagai mana yang telah tertuang dalam tujuan pembangunan nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya UU No.22 tahun 1999 dan PP No.25 tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, maka terbitlah Perda No.7 tahun 2001 yang membuat LLAJ berganti nama menjadi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No.22 tahun 1999 oleh UU No. 32 tahun 2004 serta PP No.38 tahun 2007, PP No.41 tahun 2007, Perda No.8 tahun 2008 dan Perwako No.8 tahun 2009 akhirnya mengganti nama menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru atau Dishubkominfo kota Pekanbaru. Dan pada tahun 2017 berganti nama menjadi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru.

2. Visi dan Misi

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa transportasi, pos, dan telekomunikasi yang lengkap, handal, menyeluruh dan terjangkau”

Misi :

Adapun misi-misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia tenaga kerja perhubungan yang berkualitas dan profesional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
- c. Mengusahakan ketersediaan /kecukupan dan handalan prasarana, sarana sistem jaringan transportasi.
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

2. Ruang Lingkup Kegiatan Instansi

Ruang lingkup pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru terdiri dari dua, yaitu:

- a. Rutin, yaitu semua kegiatan yang bersifat operasional. Misalnya, berupa pengawasan, penertiban, keamanan, keselamatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa kepada masyarakat umum dalam bidang komunikasi dan informatika.
- b. Pembangunan, yaitu terdiri dari proyek-proyek pengadaan pembangunan yang terbagi atas pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik berupa pembangunan jalan, jembatan, fasilitas angkutan, terminal, halte dan lain-lain. Sedangkan pembangunan nonfisik berupa sosialisasi, diklat, proyek percontohan transportasi.

3. Pembagian Tugas dan Jabatan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Adapun tupoksi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi, dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
2. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
3. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi, dan informasi.
4. Perumusan kebijakan pelaksanaan dibidang perhubungan perhubungan, komunikasi dan informasi pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibagian sekretariat.
5. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana dan kominfo.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

b. Bagian Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan bagian sekretariat dan dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
3. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan rencana anggaran biaya dan perlengkapan dinas.
4. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan pelaksanaan rapat dinas upacara serta keprotokolan.
5. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan kesekretariatan dinas.
6. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan gedung kantor.
7. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan laporan-laporan kesekretariatan.
8. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala dinas.

c. Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan

Sub bagian kepegawaian umum dan perlengkapan mempunyai tugas, yaitu:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan serta menghimpun perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bagian umum/perlengkapan dan kepegawaian.

2. Melaksanakan pendataan pegawai dilingkungan perhubungan kota Pekanbaru dan menyiapkan usulan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perhubungan kota.
3. Menyiapkan bahan untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum/perlengkapan dan kepegawaian.
4. Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibagian umum/perlengkapan kepegawaian.
5. Melaksanakan kegiatan inventarasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bagian umum/perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
6. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan kegiatan pelayanan, administrasi, kearsipan, serta dokumentasi dan hubungan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Melaksanakan kegiatan keperluan ruang pimpinan, tamu pimpinan, serta urusan keprotokolan.
9. Melaksanakan kegiatan urusan dalam rumah tangga, upacara dan rapat-rapat dinas serta akomodasi dan administrasi perjalanan dinas.
10. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan perbekalan dan materil bagi unit kerja dilingkungan dinas serta inventarisasi dan perlengkapan.
11. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan lingkungan dinas.
12. Melaksanakan kegiatan pengelolaan bahan dan data dalam rangka perencanaan pegawai dan penyusunan formasi pegawai.
13. Melakukan kegiatan penyusunan rencana pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, menyiapkan bahan-bahan kelengkapan usulan mutasi, data mutasi kepegawaian dalam kartu induk buku, cuti dan pensiun.
14. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan-bahan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi ketentuan tentang kedudukan pegawai negeri sipil.
15. Merumuskan dan melaksanakan serta menetapkan kegiatan pengelolaan data kepegawaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
17. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kesekretariatan.

d. Bidang Angkutan

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan bidang angkutan.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi bidang angkutan.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan dibidang angkutan.
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang angkutan.
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang angkutan.

e. Seksi Angkutan Jalan

1. Melakukan penyesuaian jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melaksanakan proses pemberian izin trayek angkutan kota dan angkutan perbatasan.
3. Melaksanakan proses penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota.
4. Melaksanakan proses pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah dalam kota.
5. Melaksanakan proses pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
6. Melaksanakan proses pemberian izin usaha angkutan orang.
7. Melaksanakan proses pemberian izin usaha angkutan barang.
8. Melaksanakan proses perhitungan untuk penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota.
9. Melaksanakan proses untuk pemberian izin trayek angkutan kotan yang wilayah pelayanannya dalam kota.
10. Menyiapkan bahan untuk merumuskan dan melaksanakan perencanaan pelayanan angkutan barang khusus.
11. Merumuskan dan melaksanakan proses pemberian izin dispensi angkutan alat berat, barang berbahaya dan peti kemas di jalan dalam kota.
12. Merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan dan proses penertiban sertifikat pengemudi angkutan umum (SPAU).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

f. Bidang Pengawasan.

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan dibidang pengawasan dan pengendalian operasional.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang pengawasan dan pengendalian operasional.

g. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangannya.
2. Pelaksanaan penyidikan penyelenggara:
 - a) Perda kota bidang LLAJ
 - b) Pemenuhan persyaratan teknis naik jalan
 - c) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala
 - d) Perizinan angkutan umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
4. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
5. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat.
6. Melakukan pengawasan, pengendalian lalu lintas diruas-ruas, persimpangan jalan dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
7. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

h. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

1. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan dalam kota.
2. Penyusunan dan penetapan jaringan lalu lintas angkutan barang dan jaringan jalan dalam kota.
3. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung dan perlengkapan jalan dalam kota.
4. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan dalam kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
6. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan dalam kota.
7. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas jalan dalam kota.
8. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

i. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Perairan dan Udara

1. Pelaksanaan pengawasan dan keselamatan kapal yang berlayar hanya di perairan daratan sungai dan danau.
2. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal yang berlayar dilaut.
3. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan dalam kota.
4. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
5. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyebrangan pada jaringan jalan dalam kota.
6. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya udara.
7. Merumuskan dan melaksanakan pemantauan izin operasi helipad, helideck dan heliport.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Merumuskan dan melaksanakan pengoperasian dan pengawasan helipad, helideck dan heliport.
9. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

j. Uptd Perparkiran

Uptd perparkiran kota Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran kota Pekanbaru. Adapun tugas pokok dan fungsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
3. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala dinas dalam menyusun kebijakan program dengan prosedur kerja pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan.
4. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di kota Pekanbaru.
5. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
7. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran.
8. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi pajak.
9. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah.
10. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran.
11. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran.
12. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.